

DAFTAR PUSTAKA

- Aznedra, Nurhayaty, & Putra, R. E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Skpd Kepulauan Riau). *Equilibiria*, 7(1), 33–39.
- Bodvarsson, G. S., Bjornason, S, Gunnarsson, A., Gunnlaugsson, E, Sigurdsson, O, Stefansson, V, & Steingrimsson, B. (1988). A summary of modelling studies of the Nesjavellir geothermal field, Iceland. *Proceedings: Thirteenth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 16(2007), 83–91.* <https://pangea.stanford.edu/ERE/pdf/IGAstandard/SW/1988/Bodvarsson.pdf>
- Dilla Fasa, R. F., Masnila, N., & Hartaty, S. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA. (Indonesian). *Jurnal Syntax Admiration*, 3(8), 1014–1028. <http://10.0.182.207/jsa.v3i8.467%0Ahttp://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=159388738&site=eds-live>
- Elkagiani, V. W., & Wibowo, P. (2021). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Indeks Persepsi Korupsi: A Preliminary Study. *Jurnalku*, 1(3), 222–233. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.31>
- Gedeona, H. T. (2005). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(3), 258–267. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/655
- Heriningsih, S. (2015). Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor. *Univesity Research Colloquium*, 86–95.
- International, T. (2019). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019*. http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf
- ITB, C.-. (2004). Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance. In *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* (Vol. 15, Issue 1, pp. 34–47).
- KHAIRUDIN, K., & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2). <https://doi.org/10.36448/jak.v7i2.752>

- Kini, W., Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2021). Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah. *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113–127. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i2.8046>
- Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Combating corruption is such a difficult and sensitive issue that many national political leaders who support such efforts in principle are hesitant to undertake them in practice. How can international cooperation help b. *Journal of Finance and Development, March*, 3–6.
- Nilwan, A., & Rizal, S. (2015). Implementasi transparansi pemerintah daerah dan akuntabilitas laporan keuangan untuk meminimalisasi tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. *Prosiding Penelitian Bidang Bisnis*, 1–6.
- Nurfaidah, N. (2021). Bagaimanakah Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah? *Journal Trilogi Jakarta University*, 3(2), 259–269.
- NurFaidah, N., & Novita, N. (2022). Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Spi Dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.308>
- Patiar, Rustiyaningsih, S., & Handayani, D. (2014). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada Anggota DPRD di Kab . Landak dan Kab . Sanggau Propinsi Kalim. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada Anggota DPRD Di Kab . Landak Dan Kab . Sanggau Propinsi Kalim*, 02(01), 14–24. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=320637&val=5325&title=PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH \(APBD\) DENGAN VARIABEL MODERATING PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=320637&val=5325&title=PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN VARIABEL MODERATING PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK)
- Putri, C., Sitorus, P. S., & Rahayu, S. (2018). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TINGKAT KORUPSI (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia yang Disurvei oleh KPK di Tahun 2013) THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ON THE LEVEL OF CORRUPTION (Study on Local Government in Ind. *E-Proceeding of Management* :, 5(2), 2395–2401.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan*

Keuangan), *I*(4), 431–450.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>

- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, *20*(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Setiawan, W. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Di Indonesia. Skripsi Universitas Diponegoro, 2016. *Skripsi Universitas Diponegoro*, 2016.
- Shah, A. (2007). Accountability and. In *Performance Accountability and Combating Corruption* (Issue Public Sector Governance and Accountability Series).
- Spi, P., Pencapaian, T., Wtp, O., Pencegahan, D. A. N., Melalui, K., Gug, P., & Studi, A. (2013). *Ikhtiyar, Volume 11 No. 1. Januari – Maret 2013*. *11*(1).
- Sucahyo, H. (2014). Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Paradigma*, *18*(2), 13. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2011.03.004><http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2010.01.004><http://www.biomedcentral.com/1471-2156/12/42><http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2009.11.005><http://www.sciencemag.org/content/323/5911/240.short>
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, *4*(1), 20. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2713>
- Werimon, S. (2013). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, *1*(1).

www.bpk.go.id

www.kpk.go.id